

Upaya Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar)

Dhiptya Ratri Anggraheni,¹ Abdul Aziz Al Kaharudin²

Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar

Jl. Majapahit No.2- 4, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

Email : dhiptyaratri@gmail.com unisbaabdulazizalkaharudin@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to describe the village head's efforts to increase community participation in Kepanjenkidul Village, Kepanjenkidul District, Blitar Regency. Research Method: This research, based on the location of the data source, is included in the field research category, and in terms of the characteristics of the data, it is included in qualitative research, based on the discussion, it includes descriptive research using a case study approach. Data collection methods use observation, interviews and documentation. Data analysis is carried out starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research Results: The village head's innovation in increasing community participation in development in Kepanjenkidul Village, Kepanjenkidul District, Blitar Regency is carried out by: a) always holding meetings with the community to discuss activities that need to be carried out, b) reprimanding people who are less active in participating in development activities in the village, c) Giving awards to people who are active in village development, namely giving tasks in village management, d) Firmness in leading village communities. The impact of the village head in increasing community participation in Kepanjenkidul Village, Kepanjenkidul District, Blitar Regency, namely: a) Changes in the environment to improve the standard of living of the community, so that all access is easy for the community, so that the economy can run smoothly, b) Implementation of village development will increase to provide benefits. best for the community, all access is easy for the community, so the economy can run smoothly.*

Keywords: *village head, community participation*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar. Metode Penelitian: Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian: Inovasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar dilakukan dengan jalan: a) selalu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas kegiatan yang perlu dikerjakan, b) menegur masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembangunan dalam desa, c) Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa yaitu memberikan tugas didalam kepengurusan desa, d) Ketegasan dalam memimpin masyarakat desa. Dampak kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar yaitu: a) Perubahan dalam lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, agar semua akses mudah bagi masyarakat, sehingga perekonomian dapat berjalan lancar, b) Pelaksanaan pembangunan desa akan meningkat untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, semua akses mudah bagi masyarakat, sehingga perekonomian dapat berjalan lancar.

Kata Kunci: kepala desa, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Melaksanakan pembangunan di desa sebagai Implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Menurut Ndaraha (2011) partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri partisipasi menimbulkan harapan diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat, dengan kata lain partisipasi adalah bentuk memanusiaikan manusia. Tjokrowinoto (2011) mengatakan partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi program-program. Partisipasi juga berkaitan dengan usaha tergantung untuk meningkatkan kontrol atas sumbernya dan institusi regulasi dalam situasi sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama. Secara umum partisipasi dimaknai sebagai proses stakeholders di dalam mempengaruhi dan membagi kontrol atas prakarsa pembangunan dan keputusan dan sumber daya yang mempengaruhi mereka.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat *top down*. Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan, Padahal partisipasi

masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Tjokrowinoto (2011) mengatakan partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat desa dibangun oleh landasan nilai-nilai ideal sebagai berikut: (a) Unsur kesadaran yang lahir dari dalam diri warga masyarakat /desa secara otentik untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan (Haryanti and Soebiantoro 2024). Nilai inilah yang membedakan partisipasi dengan mobilisasi. (b) Penempatan diri warga masyarakat sebagai subjek kebijakan dan pembangunan. (c) Peran-peran aktif yang sifatnya dialogis sehingga menjamin kesetaraan antar warga masyarakat. (d) Suasana kebersamaan antar warga sebagai bentuk jalinan solidaritas sosial. Oleh karena itu partisipasi didekatkan dengan semangat kebersamaan warga desa, tidak terbatas pada tingkat peran individual semata tetapi bersifat kolektif. (e) Pelembagaan dan keterlanjutan pembangunan.

Segala macam bentuk partisipasi yang bias disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di desa (Nugraha 2009). Terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan.

Menurut Tjokroamidjojo (2011) pembangunan adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap". Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). (Johan 2014)

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan (Lagantondo 2018). Kekuatan pokok yang dibangun oleh Indonesia adalah keunggulan bersaing. Hanya bangsa yang memiliki keunggulan bersaing yang pokok adalah keunggulan ekonomi. Dengan demikian, setiap bidang harus mendukung kearah terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupun secara regional. Daya dukung ideologi, politik dan hukum adalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang taat asas dan penegakkan hukum yang konsisten (Haryanti and Soebiantoro 2023). Daya dukung di

bidang sosial budaya adalah membangun paradigma pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja kesemuanya tidak akan terjadi jika tidak didukung keamanan dan ketertiban yang mantap. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan observasi di Kepanjenkidul, pelaksanaan pembangunan desa dari segi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendalanya program pembangunan infrastruktur di desa dapat terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dimana masyarakat kurang kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah demi tercapainya pembangunan, masyarakat kurang percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya dan masyarakat terlalu cepat puas terhadap diri sendiri. Sehingga perlunya strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat baik dari segi ekonomi, hukum, agama dan kesehatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengembangan terhadap masyarakat dalam bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat meliputi pikiran, tenaga dan barang/uang. Karena partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan infrastruktur dan suprastruktur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan jika dilihat dari lokasi sumber datanya. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk menemukan peristiwa-peristiwa yang menjadi subjek penelitian guna mendapatkan pengetahuan langsung terkini mengenai permasalahan yang ada dan untuk melakukan referensi silang terhadap materi-materi yang telah diterbitkan sebelumnya (Haryanti 2019). Berdasarkan karakteristik datanya, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. cara melalui uraian lisan dan tertulis dalam suasana alam yang unik dan melalui penerapan berbagai metode alam (L.J. Moleong 2013).

Studi kasus juga bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang lingkungan, item, atau peristiwa tertentu. Sudut pandang ini didukung oleh (Yin 2002) Dikatakan bahwa

jika tujuan penelitian adalah untuk melihat kejadian terkini (saat ini) dalam kehidupan nyata, maka studi kasus adalah metode yang digunakan untuk membahas bagaimana dan mengapa suatu permasalahan terjadi. Metode studi kasus (case study). Dikatakan bahwa jika tujuan penelitian adalah untuk melihat kejadian terkini (saat ini) dalam kehidupan nyata, maka studi kasus adalah metode yang digunakan untuk membahas bagaimana dan mengapa suatu permasalahan terjadi. Diharapkan dengan menggunakan desain studi kasus ini, data dan informasi mengenai tema pembahasan yang termasuk dalam fokus penelitian akan dikumpulkan dari berbagai pengalaman. Tema serupa dari situs ini kemudian dapat disimpulkan tentang upaya kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini, peneliti berupaya melakukan observasi metodis dan dokumentasi terhadap gejala-gejala yang muncul di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar. Observasi partisipatif merupakan metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini. Observasi partisipan bertujuan untuk menangkap kejadian-kejadian di lapangan yang terjadi secara alami. Dengan mengumpulkan data yang diperlukan secara metodis, peneliti terlibat atau berinteraksi langsung dengan aktivitas subjek dalam strategi ini (Pranata and Husain 2022). Wawancara Mendalam: Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan wawancara sebagai pedoman. Dengan menggunakan prosedur wawancara mendalam, peneliti ini mengkaji taktik humas yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi institusi. Peneliti akan berbicara dengan informan di bidang kehumasan, pendidikan, dan bidang lainnya. Dokumentasi: Foto-foto, dokumen-dokumen dari madrasah, transkrip wawancara, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan sejarah sekolah semuanya dapat dipertimbangkan di antara materi-materi yang dimaksud. Semua dokumen ini akan dikumpulkan dan diperiksa untuk memastikan bahwa data penelitian komprehensif. Dalam hal ini peneliti mengambil gambaran mengenai perbaikan institusi melalui penerapan total quality manajemen.

Menurut Moleong (2018) Proses pengumpulan dan pengorganisasian data secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga dapat dengan mudah dibagikan kepada orang lain disebut analisis data. Menemukan dan mengklasifikasikan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang telah dikumpulkan peneliti merupakan proses analisis data. Proses analisis meliputi penelusuran data, pengorganisasian, pemecahannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, sintesis data, pencarian tren, penentuan hal-hal yang signifikan, dan penentuan hal-hal yang telah diselidiki

dan didokumentasikan secara menyeluruh. Karena penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus, maka proses analisis data dibagi menjadi tiga tahap: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, and Saldana 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Inovasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar

Inovasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar dilakukan dengan jalan: 1) selalu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas kegiatan yang perlu dikerjakan, 2) menegur masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembangunan dalam desa, 3) Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa yaitu memberikan tugas didalam kepengurusan desa, 4) Ketegasan dalam memimpin masyarakat desa.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Suriningrat (2001) kepala desa adalah penguasa tunggal didalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Kepala Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009) mengatakan, "Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibantu oleh perangkat desa. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan pembangunan desa, maka diperlukan kemampuan, kecerdasan, keterampilan disamping persyaratan lain secara administratif.

Kepala desa harus mempunyai inovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Ndaraha (2011) partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri partisipasi menimbulkan harapan

diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat, dengan kata lain partisipasi adalah bentuk memanusiakan manusia. Partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut (Candra and Kuspriyanto 2018).

Partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan mengevaluasi program-program. Partisipasi juga berkaitan dengan usaha tergantung untuk meningkatkan kontrol atas sumbernya dan institusi regulasi dalam situasi sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama. Secara umum partisipasi dimaknai sebagai proses stakeholders di dalam mempengaruhi dan membagi kontrol atas prakarsa pembangunan dan keputusan dan sumber daya yang mempengaruhi mereka.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat *top down*. Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka pencapaian tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut. Bentuk-bentuk partisipasi yakni:

1. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi;
2. Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang menolak, menerima dengan syarat serta menerima sepenuhnya;
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan;
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan;
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan (Kusnadi and Iskandar 2017).

Segala macam bentuk partisipasi yang bias disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di desa. Terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Franchika 2021).

Dampak Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar

Dampak kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar yaitu: 1) Perubahan dalam lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, agar semua akses mudah bagi masyarakat, sehingga perekonomian dapat berjalan lancar, 2) Pelaksanaan pembangunan desa akan meningkat untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, semua akses mudah bagi masyarakat, sehingga perekonomian dapat berjalan lancar.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Hendry Rumengan (2023) yang berpendapat bahwa keberhasilan upaya pembangunan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat sekitarnya. Partisipasi masyarakat dapat diartikan juga keterlibatan secara aktif, baik secara perorangan, kelompok ataupun dalam kesatuan masyarakat. Adapun ciri-ciri partisipasi masyarakat itu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam suatu aktivitas masyarakat dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:

1. Adanya pemimpin yang mampu menggerakkan masyarakat secara aktif dan dinamis
2. Adanya objek pembangunan sehingga partisipasi masyarakat akan terlihat aktif dan dinamis.
3. Ketertarikan dan keeratatan hubungan yang harmonis baik antara sesama anggota masyarakat maupu antara masyarakat itu sendiri dengan pemimpinnya
4. Adanya tujuan hidup dan kebutuhan yang sama dimana hal ini merupakan kekuatan dan modal yang besar untuk melakukan kegiatan bersama dalam kehidupan masyarakat
5. Adanya kemampuan masyarakat itu sendiri dalam menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungan sekitar.

6. Adanya iklim yang memungkinkan timbulnya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat mempunyai arti bahwa masyarakat terlibat secara langsung melalui aktivitas-aktivitas bersama dalam program pembangunan, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Ruhana 2018). Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat lebih dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam perencanaan pembangunan (Muriany and Ruhunlela 2021). Disisi lain, konsep mengenai perencanaan sering dijelaskan sebagai suatu proses analitis dalam pengambilan keputusan (*decision making*) yang berakhir apabila suatu rencana tersebut dilaksanakan dan dimanifestasikan. Penggunaan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan menjadikan suatu organisasi lebih efektif, sebab partisipasi masyarakat akan sangat membantu dalam proses penentuan alternatif dalam pemecahan masalah (*problem solving*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa inovasi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar dilakukan dengan jalan: a) selalu mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas kegiatan yang perlu dikerjakan, b) menegur masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembangunan dalam desa, c) Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif dalam pembangunan desa yaitu memberikan tugas didalam kepengurusan desa, d) Ketegasan dalam memimpin masyarakat desa. Dampak kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar yaitu: 1) Perubahan *dalam lingkungan untuk meningkatkan* taraf hidup masyarakat, agar semua akses mudah bagi masyarakat, sehingga perekonomian dapat berjalan lancar, 2) Pelaksanaan pembangunan desa akan meningkat untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, semua akses mudah bagi masyarakat, sehingga perekonomian dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, B. E., and Kuspriyanto. 2018. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola 'Kampung Inggris' Kecamatan Pare Kabupaten Kediri (Studi Kasus 'Kampung Inggris' Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)." *Swara Bhumi E-Journal Pendidikan Geografi FIS Unesa* 5: 137–142.
- Franchika, Tri Mulia. 2021. "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan KIT (Kampung Inggris Tempirai) Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten

- Penukal Abab Lematang Ilir.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi* 1(2).
- Haryanti, Nik. 2019. *Metode Penelitian Ekonomi*. Bandung: Manggu.
- Haryanti, Nik, and Soebiantoro. 2024. “STRATEGI KOMUNIKASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA POJOK KECAMATAN.” *Transgenera* 1(1): 23–30.
- Haryanti, Nik, and Soebiantoro Soebiantoro. 2023. “Ketahanan Ekonomi Masyarakat Melalui Daur Ulang Sampah Di Bangoan Collection Center Tulungagung Jawa Timur.” *Journal of Community Service and Society Empowerment* 1(02): 104–10.
- Hendry Rumengan. 2023. “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Desa Binalang.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1(1): 21–31.
- Johan, Selomi. 2014. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.” *Journal Ilmu Pemerintahan* 3(2): 874–88.
- Kusnadi, Edi, and Dadan Iskandar. 2017. “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna.” *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (November): 358–63. <http://eprints.uad.ac.id/9926/1/358-363> Edi dan Dadan.pdf.
- Lagantondo, Herlan. 2018. “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tampemandoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso.” *Jurnal Ilmiah Administratie* 12(1).
- Miles, matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. New Delhi: SAGE Publications.
- Moleong, L.J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muriany, Telly, and Victor Ruhunlela. 2021. “Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2(1): 1–20.
- Nugraha, Andi. 2009. “Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5: 10. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>.
- Pranata, Sungguh Ponten, and Husriani Husain. 2022. “Pembuatan Mural Islami Sebagai Sarana Edukasi Pada Pesantren Taruna Alqolam Creation Of Islamic Murals As A Means of Education The Alqolam Taruna Islamic Boarding School Universitas Mahkota Tricom Unggul , Medan , Indonesia Institut Turatea Indonesia , Ma.” 2(1): 96–104.
- Ruhana, Faria. 2018. “Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Pembangunan* 5(2): 133–48. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/479>.

Yin, Robert K. 2002. *Case Study Research: Design and Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ndraha, T. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma

Tjokrowinoto, M. 2011. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tjokroamidjojo, B. 2011. *Pengantar Administrasi Penibangunan*. Jakarta: LP3ES

Suriningrat, B. 2001. *Pemerintah Dan Administrasi*. Bandung: PT. Mekar Djaya.

Suriakusumah dan Prayoga Bestari, 2009. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.